

ANALISIS PERENCANAAN KURIKULUM MERDEKA MA MANBAIL FUTUH KABUPATEN TUBAN

Lailatul Isnaini^{1*}, Surawan²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Ronggolawe
*Email: lailatulnaini011@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alenia ke-4. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara terstruktur di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dengan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Kemendikbud RI merencanakan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka yang merupakan pengembangan dari kurikulum-2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan responden Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan Kepala serta Waka Kurikulum MA Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan perivikasi data. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan “Kurikulum Merdeka” di Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk tahun ajaran 2022/2023 terbatas pada sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Kurikulum Merdeka dan belum siap untuk menerapkannya dalam pembelajaran tahun 2022/2023. Sosialisasi dan bimtek ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan menggandeng Balai Besar Peningkatan Mutu Provinsi Jawa Timur dan dihadiri Kepala dan Waka Kurikulum sebagai perwakilan dari MA Manbail Futuh serta membahas tentang hakikat Kurikulum Merdeka, dan perangkat pembelajarannya.

Kata Kunci: pendidikan; perencanaan kurikulum; kurikulum merdeka; madrasah aliyah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan ialah proses pembelajaran dengan tujuan untuk dikembangkannya bakat pada diri siswa, baik itu bersifat kepribadian, kecerdasan, spritual maupun keagamaan [1]. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja merupakan gejala yang dialami masyarakat ketika sudah mulai menyadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana cita-cita masyarakat [2]. Pendidikan di Indonesia sendiri diselenggarakan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dimana secara terstruktur pendidikan merupakan

tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud).

Dalam pendidikan di Indonesia, pembelajarannya dilakukan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidika, memberikan pengertian sebagai suatu lingkungan pengajaran di mana guru dan siswa terlibat di dalamnya [3]. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ialah salah satu komponen yang memiliki peran penting di dalam satuan pendidikan, sebab di dalam kurikulum tidak hanya merumuskan tentang tujuan yang seharusnya dicapai untuk

memperjelas arah tujuan pendidikan, dan pada akhirnya akan memberikan pengalaman pada individu siswa [4].

Sejak Indonesia merdeka, kurikulum yang ditetapkan mengalami perubahan beberapa kali. Untuk saat ini Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Implementasi kurikulum 2013 sendiri membutuhkan perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran konvensional yang hanya dilakukan di kelas, menjadi pembelajaran yang mengaktifkan siswa untuk menggunakan aneka sumber belajar yang diperoleh di luar kelas [5]. Namun dalam beberapa masa pelaksanaan kurikulum 2013, muncul penyebaran virus covid-19 secara merata di dunia khususnya Indonesia. Sehingga pemerintah membuat kebijakan baru sebagai bentuk penanggulangan dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya.

Kebijakan baru yang dibuat pemerintah adalah kebijakan pembelajaran di rumah dengan pola belajar yang dirubah. Berawal dari belajar di sekolah sekarang menjadi belajar dari rumah yang mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan secara *virtual* atau daring [6]. Subjek pembelajaran tidak bertemu secara langsung, untuk pencegahan penularan virus corona. Walaupun terlihat bagus dan sempurna, pembelajaran daring ternyata bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki jaringan kuat untuk melaksanakan pembelajaran daring, terlebih lagi bagi sekolah yang berada di daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh jaringan [7]. Ketika pembelajaran dimulai di rumah, siswa sangat banyak mendapat tugas dari gurunya, yang mana guru tersebut memberikan tugas setiap minggunya dan itu bertumpuk, dan peran orang tua sangat dibutuhkan. Namun ada juga orang tua yang mengeluh dengan keadaan tersebut karena mereka kewalahan dalam mendampingi anak-anak mereka belajar, karena mereka juga dituntut untuk bekerja demi kehidupan sehari-hari mereka sehingga anak-anak jadi terabaikan belajar di rumah dan anak-anak jadi malas dalam membuat tugas dan mereka sangat menyepelekan tugas-tugas online mereka dan menyebabkan guru-guru menjadi khawatir dengan karakter mereka nantinya [8]. Guru juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam menjalankan pembelajaran daring ini mulai dari teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar para siswa, kuota

internet yang banyak digunakan, dan kurangnya kerja sama orang tua para siswa [9].

Seiring dengan perkembangan penyebaran virus covid-19 yang menurun, kembali diberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sejak tahun pelajaran 2021/2022 pasca kurang lebih dua tahun pembelajaran dari rumah sejak 20 Maret 2020, di mana Pemerintah memberi ruang untuk melaksanakan PTM terbatas dengan tetap mengikuti protokoler Kesehatan. Namun yang menjadi permasalahannya masih banyak guru yang belum mampu menyusun rencana pembelajaran pasca PTM sehingga hal ini secara otomatis berimbas pada kualitas *output* yang dihasilkan dalam proses pembelajaran [10]. Sedangkan untuk kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini dilihat dari situasi dan kondisi memiliki banyak kelemahan yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah, walaupun memang juga memiliki banyak keunggulannya. Tetapi keunggulan itu akan terasa kurang sempurna apabila kelemahan yang ada tidak segera tertangani.

Setiap instansi pendidikan, seperti pendidikan yang berada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (pendidikan formal) maupun pendidikan non formal (luar sekolah), dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi memiliki tugas kewajiban melaksanakan pendidikan selain untuk mencapai tujuan institusional, juga mengemban dharma untuk merealisasi tujuan pendidikan nasional. Selain itu kurikulum merupakan salah satu alat dan pedoman penyelenggaraan pendidikan melalui proses belajar mengajar disekolah maupun luar sekolah dengan kata lain "kurikulum merupakan jantungnya pendidikan dan pengajaran". Namun sebelum suatu lembaga madrasah melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum, pasti lembaga tersebut memiliki Perencanaan yang terjadi pada semua kegiatan. Perencanaan (planning) dalam pandangan Solihin pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil akhir (end results) yang ingin dicapai di masa mendatang. Begitu juga dengan perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia [11].

Meninjau dari kondisi dan beberapa permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan saat ini, Kemendikbud RI merencanakan penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum yang tentu diperlukan dalam mendongkrak capaian

pembelajaran siswa. Melalui (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/2020), tentang pedoman pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan kondisi khusus dalam menanggapi beban belajar yang berat dalam kondisi khusus, di mana satuan pendidikan dapat memutuskan kurikulum yang memenuhi kebutuhan siswanya. Satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran dapat memilih tetap mengacu pada kurikulum-13, kurikulum darurat, dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Walaupun pemerintah telah memberikan kebebasan dalam memilih penggunaan kurikulum, nyatanya yang terjadi di lapangan satuan pendidikan tetap mengalami kesulitan. Hal ini menjadikan Kemendikbud RI mengeluarkan Kebijakan terkait Kurikulum Merdeka yang awalnya merupakan Kurikulum Prototipe 2022 sebagai perkembangan dari kurikulum-13 [12]. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Pada saat ini satuan pendidikan masih boleh memilih kurikulum yang akan digunakan dalam pembelajaran. Di antara pilihan yang diberikan adalah Kurikulum-13, Kurikulum Darurat (Kurikulum-13 yang disederhanakan) dan Kurikulum Merdeka [13]. Perubahan kurikulum tersebut memang tidak bisa dihindari dan dilewati, tetapi harus dijalani dan perlu untuk selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip yang ada [14].

Kurikulum merdeka menjadi program yang diharapkan dapat melakukan pemulihan pembelajaran di mana program ini menawarkan tiga karakteristik diantaranya pembelajaran berbasis projek pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar pancasila, pembelajaran materi esensial dan struktur kurikulum yang lebih fleksibel [14]. Kurikulum Merdeka atau Merdeka belajar juga berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif [15].

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan perencanaan kurikulum merdeka di Madrasah Aliyah Kabupaten Tuban. Penelitian ini kami lakukan karena kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang harus dipelajari dan dipahami oleh semua pendidik yang berkecimpung langsung dalam pembelajaran pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan uraian mengenai hal yang diteliti dan cenderung menggunakan analisis [16]. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Kepala serta Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahapan, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan perivikasi data. Sedangkan untuk pengujian keabsahan data menggunakan tiga tahap pengujian yaitu, uji kredibilitas, uji depantibilitas, dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan dan proses aktivitas pengembangan diri yang merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai menyadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam pendidikan adalah kurikulum, sebab di dalam kurikulum tidak hanya merumuskan tentang tujuan yang seharusnya dicapai untuk memperjelas arah tujuan pendidikan, tetapi juga memberikan pengalaman pada individu siswa (Zainur Roziqin, 2019). Oleh sebab itu, perencanaan kurikulum bagi sekolah atau madrasah sangatlah penting agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien serta terartur dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan perencanaan kurikulum dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia (Ahmad Hosaeni, 2019). Penelitian ini menyajikan hasil berupa data hasil wawancara kepada Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten Tuban dan Kepala serta Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten Tuban dan Kepala serta Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dapat diketahui bahwasannya pemulihan pembelajaran bisa dikatakan sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran karena kondisi khusus yaitu

pandemi Covid-19. Sehingga mengakibatkan terjadinya banyak kendala diantaranya hilangnya pembelajaran (learning loss). Menanggapi hal tersebut Kemendikbud RI melakukan beberapa terobosan antara lain dengan menyederhanakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat. Selain itu, Kemendikbud RI juga memberikan tiga opsi kurikulum kepada satuan pendidikan. Ketiga kurikulum tersebut adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka.

Adapun gambaran umum kurikulum merdeka adalah kebebasan dalam memilih. Di mana siswa, guru, dan instansi pendidikan diberikan keleluasaan untuk memilih mata pelajaran, perangkat ajar, dan kurikulum yang akan digunakan. Kurikulum merdeka juga bisa dikatakan sebagai bentuk sederhana dari kurikulum sebelumnya. Selain itu juga merupakan kurikulum yang disederhanakan.

Untuk persiapan implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran, pihak Kementerian Agama Kabupaten Tuban lebih terfokuskan untuk sosialisasi KMA no.347 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dan Kederjen no.3211 Tahun 2022 tentang Capaian Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka Madrasah. Melalui KKM MI, MTs, MA juga telah melakukan bimbingan teknis tentang Kurikulum Merdeka dengan menggandeng Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara dari pihak Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban juga hadir dan diwakili oleh Kepala, Waka Kurikulum dan satu guru mapel.

Tidak ada kriteria khusus bagi madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka dalam satuan pendidikannya. Semua madrasah boleh menerapkan, kriterianya hanya satu yaitu yang berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Tapi untuk madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum merdeka diminta untuk mendaftarkan diri lewat PDUM. Nanti akan ditentukan lolos atau tidak oleh direktur KSKK (Pusat). Di Kabupaten Tuban sendiri ada 4 madrasah untuk Tahun Ajaran 2022/2023 yang mendapat surat keputusan untuk menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya. Yaitu MTsn 1 Tuban, MTs N 2 Tuban, MIN 1 Tuban, dan MA TBB Montong. Meskipun demikian, pada dasarnya sudah banyak madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka namun tidak masuk SK.

Salah satunya adalah MA Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Di mana MA Manbail Futuh merupakan salah satu instansi pendidikan yang berencana untuk menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya. Menurut keterangan Kepala dan Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagian dari dewan guru MA Manbail Futuh telah mendapatkan sosialisasi dan bimtek hakikat kurikulum merdeka dan perangkat pembelajarannya. Dari segi sarana dan prasarana MA Manbail Futuh juga telah terpenuhi untuk mendukung perencanaan penerapan kurikulum merdeka. Mulai dari laboratorium kimia, fisika, biologi, ruang computer dan ruang kelas, juga perpustakaan. Sejak 2020 semua itu sudah lengkap. Sementara dari segi siswa MA Manbail Futuh juga siap dalam perencanaan penerapan kurikulum merdeka nanti. Karena siswa akan mengikuti apa yang diarahkan dan diberikan oleh dewan guru. Namun dalam pernyataan Bapak Arifuddin, selaku Kepala MAMan bail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban menuturkan bahwa untuk tahun ajaran 2022/2023 ini masih belum bisa menerapkan kurikulum merdeka sehingga tetap menerapkan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan ada kendala berupa akreditasi madrasah yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli akhir atau Agustus awal.

KESIMPULAN

Perencanaan “Kurikulum Merdeka” di Madrasah Aliyah Manbail Futuh Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk tahun ajaran 2022/2023 terbatas pada sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Kurikulum Merdeka dan belum siap untuk menerapkannya dalam pembelajaran tahun 2022/2023. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya terkendalanya akreditasi madrasah yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli akhir atau Agustus awal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Juliya, M. and Herlambang, Y. T. (2021) ‘ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN DARING DAN’, XII(1), pp. 281–294.
- [2] Gunawan, Imam. (2012). *Pendidikan Karakter*. Malang: Universitas Negeri Malang.

- [3] Ritonga, Maimuna. (2018). *'Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi'*. *Jurnal Ilmiah Guru Pendidikan Dasar: STKIP Bina Bangsa Meulaboh*.
- [4] Roziqin, Zainur. (2019). *'Moral Pendidikan di Era Global, Pergeseran Pola Interaksi Guru, Murid di Era Global'*.
- [5] Abdulloh, Tsani Ridwan. 2014. *'Pembelajaran Saintifik untuk Kurikulum 2013'*. Jakarta: Bumi Aksara
- [6] Atiqoh, L. N. (2020) *'Respon Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19'*, *Thufuli : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), p. 45. doi: 10.33474/thufuli.v2i1.6925.
- [7] Robandi, D. and Mudjiran, M. (2020) *'Dampak Pembelajaran Dari Masa Pandemi Covid-19 terhadap Motivasi Belajar Siswa SMP di Kota Bukittinggi'*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), pp. 3498–3502. doi: 10.31004/jptam.v4i3.878.
- [8] Yulianingsih, W. *et al.* (2020) *'Keterlibatan Orangtua dalam Pendampingan Belajar Anak selama Masa Pandemi Covid-19'*, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), pp. 1138–1150. doi: 10.31004/obsesi.v5i2.740.
- [9] Nafrin and Hudaidah. (2021). *'Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19'*, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halm 456 - 462*
- [10] Lawe Lambertus. 2022. *Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Kegiatan Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SDN Waepoa Tahun Pelajaran 2021/2022*. NTT: Jurnal Pendidikan El Budaya WARTA PENDIDIKAN
- [11] Husaeni, Ahmad. 2019. *'Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan'*. Kalimantan Timur: STIKI Indonesia.
- [12] Jojor, Anita and Hotmaulina Sitohang. (2022). *'Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan)'*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 4 Nomor 4 Tahun 2022 Halm 5150-5161*
- [13] Kemendikbud. (2022). *'Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi'*
- [14] Sadewa, Aristo. (2022). *'Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Prof. Amin Abdullah. Jurnal Pendidikan Konseling 4(1), 266-280,2022*
- [15] Rahayu, Restu. dkk. *'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak'*. *Jurnal Basicedu 6(4), 6313-6319, 2022*.
- [16] Wekke, Ismail Suardi, dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.